



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 12 Maret 2014

Halaman: 1

Media: Radar
Hari: Rabu
Tanggal: 12 Maret 2014
Halaman: 1

PEMERINTAHAN

Pemkot Ajak Awasi Anggaran Abal-Abal

JOGJA - Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono kembali menegaskan komitmennya terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara. Dia ingin anggaran dimanfaatkan sesuai tujuan dan efisien.

Untuk itu, pemkot butuh pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh pegawai di lingkungan pemkot dan masyarakat. Ini agar tidak terjadi penggunaan anggaran abal-abal alias fiktif.

"Tokoh masyarakat, pegawai pemkot, dan warga harus paham dengan anggaran. Harus ikut mengawasi. Jangan sampai muncul anggaran abal-abal. Sebab, akan menimbulkan masalah di kemudian hari," terang Imam dalam sambutan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jogja di Balai Kota Jogja kemarin (11/3).

Dia menegaskan, pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan. Sebab, anggaran pemkot disusun menggunakan basis aktivitas sehingga sudah teresap untuk pelaksanaan suatu kegiatan ■

▶ *Baca Pemkot...*, Hal 11



HOSEA JOGJA FILE
Imam Priyono

Harus Transparan Beri Informasi

■ **PEMKOT...**
Sambungan dari hal 1

Wawali juga meminta seluruh lurah dan camat memberikan informasi mengenai jenis kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun masa anggaran. Mereka wajib menyerahkan daftarnya.

Selain itu, informasi rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan seyogyanya dipentaskan di tempat terbuka. Ini sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.

Masyarakat dapat mengakses informasi itu. Masyarakat juga dapat ikut melakukan pengawasan penggunaan anggaran.

Dalam musrenbang tersebut, Imam secara blak-blakan menegaskan penggunaan anggaran harus sesuai pertuntukan yang jelas. "Masyarakat perlu paham sistem penganggaran pemerintah sehingga jika ter-

jadi praktik penyelewengan dapat melaporkannya," ucapnya.

Selain itu, Imam meminta perlunya waspada pada masa tahun politik ini. Tahun politik terkait pelaksanaan pemilihan umum dinilai rawan memunculkan anggaran abal-abal. "Jangan sampai muncul kegiatan *ujug-ujug* di luar perencanaan. Ini akan memunculkan persoalan baru dikemudian hari," tandasnya.

Dia menyatakan, adanya tim asistensi KPK di daerah dapat membantu pengawasan proses perencanaan anggaran. Termasuk kegiatan yang digelar pegawai di wilayah tanpa ada perencanaan. Jika hal itu terjadi maka dapat dipastikan anggaran tersebut abal-abal.

Imam berharap dibukanya Musrenbang untuk tahun 2015 tersebut dapat menambah kemajuan untuk Kota Jogja di masa depan. Apalagi, program perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara segera berlangsung. Program itu dapat berimbas pada pariwisata dan perekonomian.

"Perlu komitmen semua warga Jogja jangan memberikan perlindungan kepada produk luar negeri. Kalau bisa, cintai produk lokal dalam negeri," ungkapnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Ali Fahmi, yang hadir dalam musrenbang, meminta masyarakat perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di wilayah masing-masing. Sebaliknya, pemkot harus memberikan informasi kegiatan yang akan dilakukan.

"Memang kita akui selama ini masyarakat melakukan proses pengawasan mentok di perencanaan saja, bukan pengawasan di saat kegiatan," ujarnya. (hrp/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005